

# EFEKTIVITAS SITEM *ELECTRONIC* MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (*E-Musrenbang*) DI KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA

**Reny Dwi Karuniawati (12040674260)**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA (email: reenydwi@yahoo.com)

**Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA (email: efanida@yahoo.com)

## Abstrak

*E-musrenbang* merupakan sistem perencanaan pembangunan nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang bisa diakses di *website musrenbang.surabaya.go.id*. Munculnya *e-musrenbang* ditandai dengan banyaknya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam bentuk cetak (*hard copy*), proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu mulai Tahun 2009 Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya menciptakan inovasi berbentuk *electronic government* yang disebut dengan *e-musrenbang* untuk membantu merencanakan pembangunan di Kota Surabaya yang mengacu pada Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan sistem *e-musrenbang* adalah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas sistem *e-musrenbang* di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang mengacu pada variabel pengukuran efektivitas yang meliputi sistem quality, information quality, service quality, user, user satisfaction, dan net benefits (DeLone & McLean, 2003).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 51 orang dari populasi 104 orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem *e-musrenbang* di kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari penilaian setiap sub variabel dengan rincian skor sistem quality 87,7%, information quality 87,2%, service quality 87,1%, user 87,8%, user satisfaction 86,5%, dan net benefits 88,2%. Berdasarkan hasil prosentase nilai responden tersebut maka efektivitas sistem *e-musrenbang* di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya dapat dikatakan sangat efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, *Electronic Government*, *Electronic Musrenbang*

**UNESA**  
Universitas Negeri Surabaya

# EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC CONFERENCE SYSTEM DEVELOPMENT PLAN (E-Musrenbang) TAMBAKSARI DISTRICT CITY IN SURABAYA

**Reny Dwi Karuniawati (12040674260)**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA (email: reenydwi@yahoo.com)

**Eva Hany Fanida S.AP., M.AP**

S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA (email: efanida@yahoo.com)

## Abstract

E-Musrenbang is the national development planning system which obliges local governments to draw up a work plan of local government functioning as the regional planning document for a period of 1 year. Which the proposed development of a society is not done manually but is facilitated by the system of applications (online) that can be accessed on the website [musrenbang.surabaya.go.id](http://musrenbang.surabaya.go.id). The advent of e-musrenbang marked with many issues about the many proposals included in printed form (hard copy), the recapitulation of the old and the budget given not on target. Therefore since 2009 the government's development planning agency of the city of Surabaya create innovative electronic government called with e-musrenbang to help plan the construction in the city of Surabaya with reference to the law number 25 of 2004 concerning national development and planning system Permendagri 54 in 2010 on the stages of the drafting rules, control and evaluation of the implementation of the regional development plan. One of the government agencies That implement the system e-musrenbang subdistrict Tambaksari Surabaya city. The goal of the research is to find out the effectiveness of e-system in district e-musrenbang Tambaksari Surabaya. Which refers to the measurement of effectiveness indicators 6 which consists of a system of quality, information quality, service quality, user, user satisfaction, and net benefits.

The type of this research is descriptive quantitative approaches techniques of sampling used in this research is purposive sampling. Sample used totaled 51 persons out of a population of 104 persons who is an employee in the districts and subdistricts Tambaksari Surabaya. Dwarf in the collection of data used in this study was a detailed questionnaire, interview, and observation data analysis techniques. Are used in this research is descriptive data analysis.

The results showed that the effectiveness of the e-system in district e-musrenbang Tambaksari Surabaya city can be said to be very effective. This can be seen from an examination of each variable with sub details of the score system quality 87,7%, information quality 87,2%, service quality 87,1%, user 87,8%, user satisfaction 86,5% and net benefits 88,2%. Based on the percentage of the respondents value the effectiveness of the e-system in district e-musrenbang Tambaksari Surabaya city can be said to be very effective.

Keywords: Effectiveness, Electronic Government, Electronic Musrenbang.

## PENDAHULUAN

Perkembangan kemajuan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat terutama dalam teknologi informasi. Teknologi informasi sangat memiliki peranan penting bagi manusia dalam menyelesaikan berbagai aktivitas mereka secara lebih mudah dan lebih cepat. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan (Wawan Wardiana, 2002).

Salah satu yang berpengaruh dalam penggunaan teknologi informasi adalah internet. Pemanfaatan media internet sebagai fasilitas informasi telah menjadi bagian

yang sangat penting dalam masyarakat saat ini. Dengan adanya internet masyarakat dapat terhubung dan berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih. Sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi. Hal ini sebagai akibat makin beragam dan kompleksnya aktivitas manusia diberbagai sektor kehidupan.

Begitu pula dengan instansi pemerintahan yang mengedepankan teknologi informasi khususnya internet sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan sumber daya manusia (SDM) dalam mengembangkan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan publik (*public service*) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi pelayanan publik ini diarahkan pada

pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Menurut MenPan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 pelayanan publik (*public service*) adalah “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”(Menpan, 2003).

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus mempunyai kualitas pelayanan yang baik dan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintahan dalam membangun kinerja pelayanan publik yang professional. Pelayanan publik yang baik harus bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat baik masyarakat kaya maupun masyarakat miskin serta mencakup semua bidang pelayanan seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang lainnya. Pelayanan publik mempunyai asas-asas yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan Negara yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban (Kepmenpan Nomor 63/KEP/M. PAN /7/2003).

Dengan banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat saat ini mendorong pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan publik yang merata tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi pemerintahan umum dengan mengedepankan kualitas pelayanan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Andrianto (2007) pencanangan *electronic government* di Indonesia dimulai dengan dikluarkannya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi dalam upaya menunjang kinerja pemerintahan.

Sehingga dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya pemerintah berusaha memperbaiki pelayanannya dengan menerangkan dan mengembangkan pelayanan berbasis elektronik yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Pemerintah sejak Tahun 2003 telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (*e-Government*

*Development Framework*) melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-government*. Agar kebijakan pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung (Menteri Komunikasi dan Informasi, 2003).

Salah satu instansi pemerintahan yang menerapkan *e-government* adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Surabaya yang pada Tahun 2009 muncul inisiatif untuk membuat sistem *e-musrenbang*. Sistem *e-musrenbang* ini dibuat untuk membantu dalam merencanakan pembangunan Kota Surabaya yang mengacu pada Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. *E-musrenbang* merupakan kebijakan publik sebagai sebuah inovasi berbentuk *electronic government* yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan sebuah alat untuk membantu proses berjalannya musrenbang di Kota Surabaya, serta menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih terkontrol, bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

*Electronic Musrenbang* adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*) yang bisa diakses di *website musrenbang.surabaya.go.id*.

Munculnya *e-musrenbang* ditandai dengan banyaknya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam bentuk cetak (*hard copy*), proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran. Dari permasalahan di atas sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh Bapak Alvian selaku Staff Bappeko:

“Masalahnya itu tentang banyaknya usulan yang masuk dengan memberikan usulan dalam bentuk cetak (*hard copy*), selain itu proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran sehingga pegawai susah mencari datanya karena semakin banyaknya usulan yang menumpuk dalam bentuk *hard copy*, maka dari itu kita menciptakan *e-musrenbang*”.

Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya menerapkan *e-musrenbang* dalam perencanaan

pembangunan. Pengguna dalam sistem e-musrenbang ini adalah RW, kelurahan dan kecamatan. Dari ketiga organisasi tersebut mempunyai tugas masing-masing yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Namun yang berperan penting dalam pengisian data e-musrenbang adalah di tingkat kelurahan dan kecamatan.

**Tabel Data pengguna e-musrenbang di Kota Surabaya**

No	KECAMATAN	JUMLAH	
		Kelurahan	RW
1	GENTENG	5	64
2	BUBUTAN	5	53
3	TEGALSARI	5	52
4	SIMOKERTO	5	61
	<b>SURABAYA UTARA</b>		
5	PABEAN CANTIAN	5	52
6	SEMAMPIR	5	71
7	KREMBANGAN	5	48
8	KENJERAN	4	38
9	BULAK	5	22
	<b>SURABAYA TIMUR</b>		
10	TAMBAKSARI	8	78
11	GUBENG	6	63
12	RUNGKUT	5	73
13	TENGGILIS MEJOYO	5	25
14	GUNUNG ANYAR	5	29
15	SUKOLILO	7	67
16	MULYOOREJO	6	55
	<b>SURABAYA SELATAN</b>		
17	KARANG PILANG	4	29
18	DUKUH PAKIS	4	31
19	GAYUNGAN	4	33
20	JAMBANGAN	4	26
21	WONOCOLO	5	43
22	SAWAHAN	6	71
23	WIYUNG	4	32
24	WONOKROMO	6	58
25	ASEM ROWO	5	18
26	SUKO MANUNGGAL	6	34
27	BENOWO	5	25
28	LAKARSANTRI	6	31
29	SAMBIKEREP	4	38
30	PAKAL	5	34
31	TANDES	6	51
<b>TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>160</b>	<b>1405</b>

Sumber : Dispendukcapil, 2015

Dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan kepada kelompok sosial atau warga Kota Surabaya yang memiliki kepedulian untuk turut berpartisipasi memberikan usulan pembangunan dan perbaikan Kota Surabaya. Selain itu, Sistem e-musrenbang ini dapat memberikan informasi-informasi tentang usulan yang masuk, sehingga usulan lebih cepat

dan efisien diverifikasi oleh tim musrenbang. Sebagaimana yang telah diutarakan Tiara-staf Bappeko:

“Bahwasannya dengan diadakannya *e-musrenbang* masyarakat lebih mudah untuk mengakses atau mendapatkan informasi secara jelas tentang usulan-usulan yang telah dibahas di musrenbang. Sampai pada tingkatan mana usulan tersebut dibahas dalam proses musrenbang”.

Sehingga dengan diterapkannya sistem *e-musrenbang* ini dalam pencapaian dari tujuan suatu program organisasi yang dilaksanakan perlu adanya efektivitas pelayanan dimana efektivitas merupakan alat ukur tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian hasil, seperti pendapat menurut Mahmudi Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005).

Apabila dikaitkan dengan sistem Aplikasi *e-musrenbang* maka keberhasilan sistem ini dapat diukur sesuai dengan tujuan yang akan dicapai atau ditetapkan. Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam sejauh mana dalam mengukur Sistem *Elektronik* Musyawarah Rencana Pembangunan (*e-musrenbang*) yang telah diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan digunakan oleh kelurahan dan kecamatan dalam menginput usulan. Sehingga peneliti mengambil judul “**Efektivitas Sistem *Elektronik* Musyawarah Rencana Pembangunan (*e-musrenbang*) Di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya**”.

Peneliti tertarik mengambil lokasi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang mempunyai jumlah kelurahan yang paling banyak dan partisipasi warga sangat aktif dalam memberikan usulan tentang perencanaan pembangunan, sehingga usulan yang diusulkan banyak yang disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penerapan *e-musrenbang* di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian adalah “Bagaimana Efektivitas Sistem *Elektronik* Musyawarah Rencana Pembangunan (*e-musrenbang*) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

#### B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur

Efektivitas Sistem *Electronic* Musyawarah Rencana Pembangunan (*e-musrenbang*) di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

### C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama Ilmu Administrasi Negara dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang efektivitas sistem *e-government*.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Mahasiswa dan pihak lain yang terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis karena dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah, serta penulis dapat melakukan analisis secara nyata untuk mengetahui efektivitas sistem *e-musrenbang* di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya.

##### b. Bagi Universitas Negeri Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian dalam rangka menambah dan melengkapi kajian tentang efektivitas sistem pelayanan publik dimasa yang akan datang.

##### c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan upaya perbaikan masalah yang terkait dengan sistem *e-musrenbang* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh suatu organisasi, kegiatan ataupun program. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005) dalam bukunya "*Manajemen Kinerja Sektor Publik*" mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Sedangkan Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa Efektivitas merupakan perbandingan tingkat pencapaian hasil program (*output*) dengan target yang ditetapkan (*outcome*).

Berdasarkan pendapat kedua diatas dapat dikatakan bahwa apabila pencapaian suatu tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keefektivasannya. Dalam organisasi dapat dikatakan efektif apabila dalam penerapannya terdapat *output* yang besar sehingga dapat mencapai target semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

### B. Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang mudah, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Seperti Model pengukuran keberhasilan sistem informasi yang lain dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, yang dikenal dengan *D&M IS Success* (DeLone dan McLean, 2003). Menetapkan 6 (enam) variabel dalam melakukan pengukuran efektivitas sistem informasi (IS) yang meliputi:

#### 1. System Quality

*System quality was measured in terms of ease-of-use, functionality, reliability, flexibility, data quality, portability, integration, and importance. Individual impacts were measured as quality of work environment and job performance.*

#### 2. Information Quality

*Information quality was measured in terms of accuracy, timeliness, completeness, relevance, and consistency. Individual impact was measured in terms decision-making performance, job effectiveness, and quality of work.*

#### 3. Service Quality

*Service quality was measured in terms of up-to-date hardware and software (tangible), dependable (reliability), employees give prompt service to users (responsiveness), employees have the knowledge to do their job well (assurance), and has users' best interests at heart (empathy).*

#### 4. Use

*System use was typically voluntary and was measured as frequency of use, time of use, number of accesses, usage pattern, and dependency. Individual impacts were measured in terms of job performance and decision-making performance.*

#### 5. User Satisfaction

*User Satisfaction was measured in terms of in content, accuracy, format, easy to use, dan timeliness (Doll dan Torkzadeh dalam Murahartawaty,2013)*

#### 6. Net Benefit

*Net Benefit was measured in terms of make job easier, usefull, increase productivity, enhance effectiveness, improve job performance* (Chin dan Todd dalam Murahartawaty, 2013)

#### C. Electronic Government

Peran pemerintah dalam pelayanan kepada publik era *modern* sekarang telah mengalami peningkatan. Hal tersebut, disesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang serba efektif dan efisien. Pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi pada tiap instansi pemerintahan dikenal dengan istilah *e-Government*. Pengertian *e-Government* menurut Richardus Eko Indrajit (2004:4-5) adalah:

- a. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*);
- b. Melibatkan pengguna teknologi informasi (terutama *internet*);
- c. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selam berjalan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa *e-Government* merupakan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronika dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya *e-Government* disatu sisi pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik guna dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

#### D. Pengertian Musrenbang

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) telah menjadi istilah yang sangat populer dalam proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 bahwasannya musrenbang menjadi forum bagi antar pelaku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 2 yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dengan memiliki jenjang perencanaan yang berbeda, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

yaitu perencanaan jangka panjang daerah yang disingkat RPJPD untuk periode 20 tahun (pasal 1 ayat 9), selanjutnya rencana jangka menengah daerah yang disebut RPJMD untuk periode 5 tahun (pasal 1 ayat 12) , maupun rencana jangka pendek atau tahunan yaitu rencana kerja pemerintah daerah yang biasa disebut RKPD 1 tahun (pasal 1 ayat 16 ) Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.

#### E. Pengertian Elektronik Musrenbang

E-Musrenbang adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi difasilitasi oleh sistem aplikasi (*online*).

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut sugiyono (2011) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif karena berkaitan dengan tujuan dari penelitian yaitu mengukur dan mendeskripsikan efektivitas e-musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya berdasarkan jawaban responden pada kuisioner yang dibagikan.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mendut No. 07 Surabaya.

Alasan peneliti mengambil tempat tersebut sebagai tempat penelitian karena partisipasi warga Kecamatan Tambaksari yang sangat tinggi dibuktikan dengan banyaknya jumlah usulan yang diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Selain itu Kecamatan Tambaksari ini juga mempunyai kelurahan yang banyak yaitu terdiri dari 8 kelurahan sehingga peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan e-musrenbang.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 104 orang yang diambil dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan e-musrenbang di kecamatan dan Kelurahan yang ada di Tambaksari Kota Surabaya. Adapun sampel yang diambil berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik penarikan *Nonprobability Sampling Design* yaitu dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Alasan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Dimana pegawai kecamatan dan kelurahan Tambaksari Kota Surabaya yang dinilai tahu dan paham tentang sistem e-musrenbang.

### D. Definisi Operasional Variabel

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas program ini adalah menurut William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, yang dikenal dengan *D&M IS Success* (DeLone dan McLean, 2003). Menetapkan enam variabel dalam melakukan pengukuran efektivitas sistem informasi (IS) yang meliputi:

- a. *System Quality* (Kualitas Sistem) merupakan pengukuran terhadap kualitas sistem e-Musrenbang itu sendiri oleh pengguna aplikasi tersebut.
- b. *Information Quality* (Kualitas Informasi) merupakan pengukuran terhadap kualitas informasi yang ada didalam website e-Musrenbang baik informasi mengenai jenis usulan, volume usulan, besaran usulan, besaran anggaran dan lokasi usulan maupun informasi penting lainnya.
- c. *Service Quality* (Kualitas Pelayanan) merupakan pengukuran terhadap kualitas pelayanan yang mendukung sistem e-Musrenbang ini.
- d. *Use* (Pengguna) merupakan pengukuran terhadap seberapa besar masyarakat menyukai aplikasi ini. Misalnya dapat ditunjukkan dengan seberapa sering pengguna memanfaatkan aplikasi ini.
- e. *User Satisfaction* (Kepuasan Pengguna) merupakan pengukuran terhadap seberapa puas pengguna menggunakan aplikasi e-Musrenbang ini.
- f. *Net Benefit* (Keuntungan Bersih) pengukuran terhadap seberapa banyak/seberapa besar keuntungan pengguna karena telah menggunakan aplikasi e-Musrenbang ini.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam

maupun sosial yang diamati (Sugiyono,2011). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang disebarakan kepada pengguna aplikasi e-Musrenbang untuk menilai efektivitas sistem e-Musrenbang di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala Likert dipilih karena untuk mempermudah peneliti untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012).

### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner, observasi dan wawancara.

### G. Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan suatu uji validitas dan realibilitas.

### H. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012) Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Penggunaan model ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu pengolahan data, pengorganisasian, dan penemuan hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

Untuk menguji apakah instrument yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau tidak , sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan apa yang diukur. Maka sebelum dilakukan analisis data berdasarkan hasil data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan pengujian data melalui uji validitas dan uji reliabilitas.

Pengujian validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan alat bantu komputer melalui program *SPSS for Windows Versi 22.0*. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan kepada 30 responden dengan taraf signifikan ( $\alpha$ )= 1% atau 0,01. Apabila pada nilai  $r$  hitung >  $r$  tabel yaitu sebesar 0,463 maka pertanyaan/item tersebut valid dan sebaliknya. Berikut hasil uji validitas secara keseluruhan:

**Tabel Hasil Perhitungan Uji Validitas**

No.	R hitung	R tabel	Keterangan
1.	0,517	0,463	Valid
2.	0,659		Valid
3.	0,646		Valid
4.	0,783		Valid
5.	0,674		Valid
6.	0,692		Valid

7.	0,736	Valid
8.	0,824	Valid
9.	0,813	Valid
10.	0,613	Valid
11.	0,525	Valid
12.	0,595	Valid
13.	0,813	Valid
14.	0,605	Valid
15.	0,616	Valid
16.	0,621	Valid
17.	0,646	Valid
18.	0,840	Valid
19.	0,771	Valid
20.	0,711	Valid
21.	0,787	Valid
22.	0,793	Valid
23.	0,613	Valid
24.	0,702	Valid
25.	0,766	Valid
26.	0,829	Valid
27.	0,823	Valid
28.	0,791	Valid
29.	0,681	Valid
30.	0,699	Valid
31.	0,799	Valid
32.	0,653	Valid
33.	0,541	Valid

Sumber: Data primer penelitian yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui hasil dari 33 item soal pernyataan dengan taraf signifikan sebesar 1% dengan jumlah N sebanyak 30 dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel memiliki nilai korelasi diatas 0,463 sebagai nilai batas suatu item kuisioner. sehingga dapat dikatakan bahwa item angket atau kuisioner valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti.

Pada penelitian ini Pengujian reliabilitas yang dilakukan peneliti dengan menggunakan alat bantu komputer yang menggunakan program *SPSS for Windows Versi 22*. Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Cronbach's Alpha	N of Items
.967	33

Berdasarkan hasil tabel uji reliabilitas diatas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari 33 item pernyataan adalah sebesar 0,967. Jadi, sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa kuisioner yang digunakan sudah reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* yang sebesar 0,967 lebih dari (>) 0,6.

## B. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) variabel pengukuran efektivitas sistem e-musrenbang (DeLone & McLean, 2003) yang meliputi system quality, information quality, service quality, user, user satisfaction, dan net benefits. Dari 6 sub variabel tersebut diolah menjadi 33 item

pertanyaan dalam kuesioner penelitian. Berikut hasil penelitian pada tiap variabel akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel Jumlah Skor Variabel Efektivitas Sistem Electronic Musrenbang**

No	Indikator	Skor yang diperoleh	Skor Ideal	Prosentase
1.	<i>System Quality</i>	1790	2040	87,7%
2.	<i>Information Quality</i>	1112	1275	87,2%
3.	<i>Service Quality</i>	1110	1275	87,1%
4.	<i>User</i>	1120	1275	87,8%
5.	<i>User Satisfaction</i>	1103	1275	86,5%
6.	<i>Net Benefits</i>	1124	1275	88,2%
	<b>TOTAL</b>	<b>7359</b>	<b>8415</b>	<b>87,5%</b>

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

## C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai prosentase skor jawaban variabel efektivitas sistem e-musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya yaitu sebesar **87,5%** dan termasuk dalam kategori **Sangat Efektif**. Jadi, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sistem *electronic* musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini juga dapat dilihat dari perolehan skor prosentase skor jawaban pada tiap indikator yang mana menunjukkan kategori Sangat Efektif, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

### 1. *System Quality* (Kualitas Sistem)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 51 responden, pada indikator *system quality* (kualitas sistem) inmendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 87,7% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem *electronic* musrenbang ini sudah baik. sebgaiian besar responden menganggap bahwa sistem *electronic* musrenbang ini memudahkan pegawai maupun masyarakat dalam memberikan usulan perencanaan pembangunan didaerahnya masing-masing. Hal tersebut berarti kualitas sistem yang

terdapat pada sistem electronic musrenbang sudah dapat dikatakan sangat efektif dari segi kemudahan, keandalan, fungsionalitas, fleksibilitas, kualitas data, portabilitas, integrasi dan kepentingan. Dibuktikan dengan adanya kualitas sistem aplikasi yang sangat memberikan kemudahan kepada *user* (pengguna) dalam menginput data tentang perencanaan pembangunan, selain itu juga data yang sudah diinput bisa dirubah jika terjadi kesalahan sehingga *user* dapat memperbaiki data tersebut agar proses usulan dapat disetujui oleh SKPD.

2. *Information Quality* (Kualitas Informasi)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 51 responden, pada indikator *information quality* (kualitas informasi) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 87,2% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas informasi sistem elektronik musrenbang ini sudah baik. Responden menganggap bahwa informasi yang dibutuhkan sudah tersedia di website secara lengkap dan menganggap bahwa informasi yang ditampilkan di website musrenbang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat diperoleh secara tepat waktu karena jadwal musrenbang setiap tahun sudah ditentukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yaitu pada bulan Januari-April.

3. *Service Quality* (Kualitas Pelayanan)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 51 responden, pada indikator *service quality* (kualitas pelayanan) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 87,1% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan sistem elektronik musrenbang ini sudah baik. Artinya responden senang dengan adanya layanan ini karena proses pengisian usulan semakin cepat selain itu layanan e-musrenbang ini memberi kemudahan kepada pegawai atau masyarakat dalam mengusulkan rencana pembangunan untuk masing-masing daerah atau kota, selain itu juga adanya transparansi antara masyarakat dengan organisasi pemerintahan karena anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sudah tertera langsung di dalam website musrenbang sehingga anggaran yang diberikan oleh Badan Perencanaan pembangunan Kota Surabaya kepada setiap kecamatan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pada saat

mengajukan (mengisi) usulan perencanaan pembangunan.

4. *User* (Penggunaan)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 51 responden, pada indikator *user* (pengguna) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 87,8% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa responden lebih senang menggunakan sistem *online* dari pada manual karena dapat menghemat kertas (*paperless*), selain itu responden menganggap sistem ini dapat mempercepat pekerjaan karena prosedur atau tata cara pengisian sistem ini juga mudah dipahami user tinggal mengeklik tombol yang sudah tersedia di dalam website e-musrenbang.

5. *User Satisfaction* (Kepuasan Penggunaan)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 51 responden, pada indikator *user satisfaction* (kepuasan penggunaan) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 86,5% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka puas terhadap sistem yang disediakan oleh BAPPEKO baik dari segi konten (isi), akurasi data, format aplikasi, kemudahan penggunaan dan aktual. Dibuktikan dengan banyaknya usulan yang masuk dari masyarakat untuk membangun setiap daerahnya masing-masing. Selain itu masyarakat puas karena usulan yang mereka ajukan bisa langsung dipantau lewat website mesrenbang yang bisa diakses di [www.musrenabang.go.id](http://www.musrenabang.go.id)

6. *Net Benefits* (Keuntungan Bersih)

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 51 responden, pada indikator *net benefits* (keuntungan bersih) ini mendapatkan prosentase skor jawaban sebesar 88,2% yang berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian responden menganggap sistem e-musrenbang ini sangat membantu pegawai kecamatan dan kelurahan dalam mengembangkan efektivitas organisasi karena dapat mempercepat pekerjaan pegawai, mempertinggi efektivitas layanan dan mengembangkan kinerja pegawai karena pegawai dapat menginput data dengan cepat tanpa memakan waktu yang cukup lama.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas sistem *electronic* musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya sudah berjalan sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan data yang kemudian diolah secara sistematis yang mana menunjukkan bahwa prosentase skor jawaban variabel efektivitas sistem *electronic* musrenbang adalah sebesar **87,5%** dan termasuk dalam kelas interval 81% - 100% dengan kategori **Sangat Efektif**.

Hasil tersebut tidak terlepas dari perolehan skor jawaban pada masing-masing indikator pengukuran variabel efektivitas sistem *electronic* musrenbang yang semuanya berada pada kategori Sangat Efektif. Dari 6 (enam) indikator pengukuran efektivitas tersebut dapat diketahui bahwa jawaban skor tertinggi adalah indikator *net benefits* (keuntungan bersih) yaitu sebesar 88,2% dan indikator terendah adalah indikator *user satisfaction* (kepuasan penggunaan) yaitu sebesar 86,5%.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan secara keseluruhan pelaksanaan sistem *elektonic* musrenbang di Kecamatan tambaksari sudah berjalan Sangat Efektif, sehingga disini peneliti menyarankan agar Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan. Namun, ada beberapa saran juga dari peneliti yang bersifat membangun dan mungkin bisa lebih meningkatkan pelaksanaan *electronic* musrenbang di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, yaitu:

1. Berdasarkan pengamatan peneliti, pelaksanaan *e-musrenbang* di Kecamatan Tambaksari sudah berjalan dengan efektif dan efisien, namun masih ada yang perlu diperbaiki seperti usulan masyarakat yang sudah disetujui tidak segera dilaksanakan oleh dinas – dinas yang terkait *e-musrenbang*. Sebaiknya dinas-dinas ini segera melaksanakan apa yang telah disetujui oleh pihak Bappeko karena banyak kepala kecamatan yang meminta pertanggungjawaban kepada pihak Bappeko tentang pelaksanaan pembangunan *e-musrenbang*, padahal tugas Bappeko hanya membuat perencanaan anggaran pembangunan yang melaksanakan pembangunan itu dinas yang terkait *e-musrenbang*.
2. Dalam melaksanakan kegiatan musrenbang dengan menggunakan sistem aplikasi *e-*

*musrenbang* di Kelurahan telah dilaksanakan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan pegawai yang terkesan kurang memahami tupoksi/tugas-tugas nya sehingga pegawai tidak mau saling membantu antara pegawai satu dengan pegawai lainnya (saling menggantungkan).

3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat luas yang mungkin belum paham tentang *e-musrenbang* terkait usulan rencana pembangunan di daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat lebih mengetahui apa itu musrenbang dan masyarakat umum lebih aktif dalam mengajukan aspirasi mengenai rencana pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Rujukan Buku dan Jurnal

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrajit, Richardus Eko (2004). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- DeLone, W. H., and Ephraim R, McLean. 2003. *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update*. Journal of Management of Information System. Vol. 19 Iss. 4, p. 9-30 (Diunduh dari: <http://www.mesharpe.com>. Pada tanggal 15 Februari 2015)

### Sumber Lain :

*Musrenbang.surabaya.go.id*

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Keputusan Menteri Negara Pernerdayaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7//2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Inpres No.3 Tahun 2003 Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

